
PERKEMBANGAN POLITIK POPULISME DI INDONESIA

Oleh

Itok Dwi Kurniawan¹⁾, Hanuring Ayu AP²⁾¹Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia²Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, IndonesiaEmail: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi bertumbuhnya populisme di Indonesia. Perkembangan politik di dunia juga berpengaruh terhadap politik di Indonesia. Tulisan ini untuk mengetahui tentang populisme di Indonesia sekarang ini. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Perkembangan demokrasi pasca-Orde Baru bersamaan dengan tumbuhnya politik identitas dalam perebutan kekuasaan bahkan lebih kelihatan daripada pertarungan program-program. Populisme yang berkaitan dengan politik identitas akan terus menjadi isu dalam pemilu karena kandidat juga mewakili identitas tertentu, seperti Jawa, Islam, luar Jawa. Populisme yang berkembang di Eropa akan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan populisme di Indonesia jika kita merujuk pada kasus pilkada DKI Jakarta bukanlah hal yang menggembirakan. Perkembangan populisme di Indonesia disinyalir karena kebangkitan politik Islam garis keras dan penggunaan politik identitas. Populisme harus sedapat mungkin dihindari di Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya. Populisme yang wajib dihindari apabila menggunakan agama sebagai bahan kampanye dan memecah belah bangsa dengan memanfaatkan politik identitas. Jika populisme yang demikian tidak dihindari, akibatnya rusaknya solidaritas masyarakat multikultural di Indonesia.

Kata Kunci: Perkembangan, Politik Populisme, Indonesia**PENDAHULUAN**

Perkembangan politik di dunia sekarang sangatlah cair. Jika dahulu di dunia berkembang ide kapitalisme dan sosialisme, kini, merebak ide populisme yang diyakini sebagai paham baru. Kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat menumbuhkan populisme yang sebelumnya banyak dianut oleh partai sayap kanan di Eropa dan partai sayap kiri di Amerika Latin.

Kemenangan Donald Trump ingin diulang oleh kandidat Front Nasional Prancis, Marine Le Pen di pemilu Prancis dan beberapa politisi Eropa lainnya, seperti Beppe Grillo (Italia), Norbert Hofer (Austria), Geert Wilders (Belanda), Frauke Petry (Jerman), Nigel Farage (Inggris), Pablo Iglesias (Spanyol).

Perkembangan populisme di Eropa karena peningkatan imigrasi di Eropa, terutama setelah krisis politik di Suriah. Hal tersebut telah menimbulkan ketakutan pada elemen konservatif masyarakat Eropa bahwa imigran, terutama dari negara-negara Muslim, dapat secara perlahan merusak nilai-nilai sosial dan budaya yang telah mengakar. Imigran juga dianggap akan menggunakan layanan sosial yang diberikan kepada pemerintah sekalipun mereka tidak dilahirkan di negara tersebut dan diragukan kesetiaan terhadap negara baru mereka. Negara Eropa yang mengalami masalah imigrasi kerap menyalahkan pendatang sebagai pencetus melonjaknya angka pengangguran karena merebut lapangan kerja dari penduduk asli.

Para pejuang populisme pada umumnya sangat mengutamakan nasionalisme, baik ekonomi, politik, maupun kewarganegaraan. Donald Trump memenangi pilpres AS adalah slogannya: *I will make it great again*. Slogan ini sangat populistis sekali. Trump ingin AS menjadi negara *superpower* lagi dunia, menjadi polisi dunia lagi. Sekarang ini, AS bukanlah menjadi negara *superpower*, melainkan hanya salah satu negara yang memiliki *power*, selain Tiongkok, Rusia, India, dan Inggris.

Marine Le Pen¹ pun juga berkampanye dengan nada mirip Trump, yaitu anti-Uni Eropa dan anti-imigran. Sikap menantang terhadap model integrasi Uni Eropa juga dilakukan oleh Geert Wilders, pemimpin Partai Kebebasan dari Belanda, menuduh bahwa Uni Eropa merampas uang, identitas, demokrasi dan kedaulatan Eropa. Wilders menyatakan bahwa rakyat Belanda ingin berkuasa di negeri sendiri, menguasai uang sendiri, perbatasan sendiri dan kebijakan imigrasi sendiri. Salah satu janji ambisius Wilders jika dirinya menjadi perdana menteri adalah secepat mungkin mengadakan referendum bagi Belanda untuk meninggalkan Uni Eropa.

Krisis yang dapat membiakkan populisme sudah didefinisikan secara jitu oleh Christa Deiwiks (2009) dalam tiga bentuk. Pertama, kondisi krisis ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pertumbuhan, dampak globalisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan lain-lain menjadi humus yang subur bagi lahirnya klaim-klaim populisme. Kedua, sebagaimana ditegaskan Canovan (1999: 2),

populisme merupakan kritik tajam atas kegagalan *representative democracy*. Ketiga, kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat plus ketimpangan janji-janji demokrasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin populis untuk retorika politik yang melenakan.²

Selain itu, pupuk yang menyuburkan populisme adalah ketidakjelasan populisme sebagai ideologi, gerakan, dan sindrom. Namun, akhir-akhir ini, ilmuwan sosial meneliti populisme dengan menggunakan pendekatan ideasional atau diperlakukan seperti ideologi. Jika diamati dengan kaca mata ideologi, populisme dilihat sebagai ideologi tipis (*thin-centered ideology*), yaitu ideologi yang memisahkan masyarakat menjadi dua pihak yang homogen dan antagonis, orang-orang murni versus elit korup, padahal politik seharusnya merupakan ungkapan *volonté générale* (kehendak umum) rakyat.³

Kelebihan populisme sebagai ideologi tipis adalah populisme lebih lentur daripada ideologi tebal (*thick-centered ideology*), misalnya, Fasisme, Liberalisme, Sosialisme. Populisme sebagai ideologi tipis memiliki morfologi terbatas, yang melekat, dan kadang-kadang berasimilasi ke dalam ideologi lain. Karena itu, populisme hampir selalu tampak melekat pada elemen ideologis lainnya. Akibatnya, populisme tidak dapat memberikan jawaban komprehensif atas pertanyaan-pertanyaan politik yang dihasilkan oleh masyarakat modern.⁴

¹ Pada periode 1970-an hingga 1980-an, populisme menemukan simbolisasinya dalam sosok seorang Jean-Marie Le Pen, ayah Marine Le Pen, yang terinspirasi dari pemikiran Pujade dan mendirikan Front Nasional pada 1972. Front Nasional menekankan pada sikap anti-asing, anti-imigrasi dan mengabaikan republikanisme yang telah diterima secara umum oleh partai-partai di Prancis. Gerakan populisme Prancis menambahkan isu anti-integrasi Eropa pada 2002 karena konsep Uni

Eropa dipandang berlawanan secara langsung dari sikap patriotisme Prancis.

² Burhanudin Muhtadi, *Populisme: Madu atau Racun Bagi Demokrasi?* Dalam www.saifulmujani.com/blogs/populisme-madu-racun-bagi-demokrasi, diakses pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 21.19 WIB.

³ Cas Mudde and Cristobal Rovira Kaltwasser, *Populism: a very short introduction*, 2017, United States of America: Oxford University Press, page. 6.

⁴ Ibid, page 6.

Oleh karena tidak jelas, populisme terjadi di hampir semua ideologi, meskipun sebelumnya populisme erat kaitannya dengan partai sayap kiri di Amerika Latin. Namun, populisme pada sekarang, sebagaimana terjadi di Indonesia, juga muncul populisme kanan yang sering disebut populisme Islam. Paper ini akan meneliti kemunculan populisme di Indonesia, baik yang populisme kiri (jika ada) maupun populisme kanan (baca: Islam) dan faktor-faktor yang mendorong cepatnya populisme itu berkembang. Sebagai negara yang baru saja berdemokrasi, populisme juga bisa menjadi pencetus bahwa demokrasi itu bukan pilihan yang baik bagi Indonesia karena menyebabkan suatu krisis, misalnya, terpecahnya ikatan sosial masyarakat.⁵

Mengacu pada uraian latar belakang diatas, maka dalam pembahasan mengenai substansi yang hendak diuraikan dalam penelitian ini, selanjutnya penulis akan memberikan limitasi pembahasan Bagaimana populisme di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka⁶. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus)⁷. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah

metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan⁸.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populisme di Indonesia

Perkembangan demokrasi pasca-Orde Baru bersamaan dengan tumbuhnya politik identitas dalam perebutan kekuasaan bahkan lebih kelihatan daripada pertarungan program-program. Populisme yang berkaitan dengan politik identitas akan terus menjadi isu dalam pemilu karena kandidat juga mewakili identitas tertentu, seperti Jawa, Islam, luar Jawa.

Populisme diperkirakan masuk di Indonesia sejak Pemilu 2014. Marcus Mietzner menyatakan Pemilu 2014 menghadirkan dua kandidat yang membawa narasi populisme, meski dengan beberapa perbedaan. Prabowo Subianto adalah contoh kandidat populis *text-book*: menggambarkan sistem yang ada sebagai rusak dan ia akan memperbaiki semua, serta menyerang kepentingan asing. Joko Widodo menawarkan narasi populisme yang lebih lunak –memperbaiki dari dalam dan menggambarkan diri sebagai figur yang lebih inklusif dan tidak konfrontatif.⁹

Peneliti dalam paper ini akan menggunakan faktor-faktor yang menyebabkan populisme berkembang di Indonesia sebagaimana Christa Deiwiks, Ronald Inglehaerat dan Pippa Norris, serta menggunakan penyebab perkembangan populisme di Eropa sebagai analogi.

a. *Pemimpin yang karismatis*

Populisme banyak didengungkan oleh pemimpin yang karismatis. Populisme dan pemimpin yang karismatis sangatlah berhubungan karena daya tahan gerakan

⁵ Terpecahnya ikatan sosial ini, peneliti merujuk pada Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 yang menurut banyak pihak merupakan pilkada rasa pilpres. Sebenarnya yang terjadi adalah pemberitaan media begitu massif karena Pilkada itu berlangsung di ibu kota sehingga masyarakat banyak sekali terpengaruh hoax (berita palsu).

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13

⁷ *Ibid*, hlm 23

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁹ Marcus Mietzner, *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*, Hawaii: East West Center, 2017, halaman 2 – 3.

populisme bergantung kepada pemimpinnya. Meskipun demikian, populisme juga melibatkan rakyat dalam mengekspresikan gerakannya.

Jika diukur dengan pelibatan rakyat, demokrasi dan populisme ada kesamaan. Namun, definisi pelibatan rakyat antara demokrasi dan populisme sangatlah berlawanan. Rakyat yang dilibatkan dalam demokrasi adalah para warga negara, pekerja, partai-partai, dan sebagainya, sedangkan dalam populisme, rakyat adalah massa yang tidak terdiferensiasi atau kerumunan yang dikerahkan atas nama demokrasi; tetapi tujuan sebenarnya tidaklah demokratis.

Kondisi kerumunan membutuhkan arahan, terutama pemimpin yang karismatis, yang naik panggung bukan karena orasi dengan penuh argumentasi rasional, melainkan penuh dengan slogan-slogan dan alasan sentimental untuk memancing emosi kerumunan. Dengan demikian, pemimpin yang populis merupakan gambaran pemimpin yang mampu memainkan jiwa dan sisi irasionalitas pendukungnya.

Sebagaimana telah dijelaskan, Prabowo Subianto adalah pemimpin *text-book* populisme. Prabowo mempromosikan gabungan antara tema nasionalisme dan populisme yang sering digunakan oleh politisi demagog di seluruh dunia. Dalam setiap kampanyenya, dia selalu menekankan tema nasionalisme bahwa kekayaan alam yang dimiliki Indonesia telah dieksploitasi sekian lama oleh bangsa lain sehingga rakyat dijadikan “kacung” di negeri sendiri. Dia juga berbicara panjang lebar tentang kesulitan yang dihadapi kaum miskin dan bagaimana mereka menderita sebagai akibat dari korupsi, neoliberalisme, neokapitalisme, pengaruh asing dan penyakit-penyakit lainnya. Tidak ada yang aneh dari pesan Prabowo ini: dukungan terhadap “wong cilik” dan hujatan terhadap korupsi adalah tema

standar dalam perpolitikan di Indonesia. Hanya saja, gaya bahasa yang digunakan Prabowo jauh lebih dramatis bahkan militant daripada yang digunakan oleh para politisi lainnya. Selain itu, Prabowo menyampaikan kritik ini berbarengan dengan hujatan terhadap seluruh elit politik yang dia gambarkan sebagai sangat korup dan hanya melayani diri sendiri.¹⁰ Berikut ini salah satu contoh hujatan dan kritikan Prabowo:

“Terlalu lama... Bangsa Indonesia, elitnya terlalu banyak bicaranya bohong... Bohong kepada rakyat! Bohong kepada bangsa! Bohong kepada dirinya sendiri!” Selanjutnya dia menambahkan, “Semua dikorupsi! Semua disogok! Semua pemimpin kita mau dibeli dan mau disogok!”¹¹

Hujatan dan kritikan Prabowo tersebut mampu membelah rakyat dan elite yang penuh korup serta Prabowo akan menjadi pimpinan rakyat tersebut karena tinggal satu-satunya pemimpin yang belum korupsi dan bohong adalah dirinya sendiri. Itulah pengertian populisme yang tidak mendiferensiasi massa rakyat terdiri dari unsur apa saja, tetapi membelah rakyat dan elite politik yang korup.

Contoh populisme paling kentara di Indonesia baru-baru ini adalah pemilukada DKI Jakarta 2017. Mobilisasi kekuatan Muslim konservatif dan retorika politik yang rasialis dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 telah membuka jalan bagi kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengalahkan pasangan petahana, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Banyak pengamat dan media mencap kekalahan pasangan Basuki – Djarot itu sebagai indikasi menguatnya populisme di Indonesia.

Siapa penggerak populisme dalam pilkada DKI Jakarta 2017 itu? Faktor

¹⁰ Edward Aspinall, *Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya, New Mandala New perspectives on Southeast Asia* <http://www.newmandala.org>, edisi

bahasa Indonesia tanggal 21 Juni 2014, halaman 5 – 6, diakses 20 Januari 2018, pukul 07. 32 WIB.

¹¹ Ibid, halaman 6.

penggerak populisme berkembang di pilkada DKI Jakarta 2017 adalah pemilih Jakarta ingin mengekspresikan penolakan mereka terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap telah menghina Islam ketika mengutip Surah Al Maidah 51. Mereka juga mengungkapkan penolakan untuk dipimpin oleh seorang gubernur yang tidak seiman dengan mereka. Salah satu ekspresi nyata penolakan tersebut adalah demo 411 dan demo 212.

Tentunya mengumpulkan orang sebanyak itu dalam kedua demo tersebut bukanlah pekerjaan mudah. Pasti ada penggerakannya. Penulis mengobservasi berbagai tulisan di media menyimpulkan strategi kampanye pasangan Anies – Sandi yang berperan dalam mengumpulkan individu dalam demo besar-besaran tersebut.

Penulis menganalisis kampanye Anies–Sandi menggunakan dua mekanisme yang berlawanan. Mekanisme pertama, citra Anies–Sandi digambarkan sebagai pasangan yang santun dan pluralis. Adapun mekanisme kedua, sebuah kampanye yang dilakukan oleh organisasi Islam garis keras, seperti Front Pembela Islam (FPI). FPI dan kelompok yang berafiliasi kepadanya bertugas melaksanakan mobilisasi lewat pengajian-pengajian dan mengorganisasikan kampanye dari masjid. Pihak-pihak yang terlibat aktif dalam kampanye inilah yang aktif melakukan demonstrasi untuk menuntut agar gubernur petahana dijebloskan ke dalam penjara karena kasus penistaan agama. Kelompok ini juga melakukan perisakan sosial (social bullying) dan intimidasi terhadap pemilih, khususnya terhadap pemilih Muslim.

Strategi kampanye mekanisme kedua inilah yang disinyalir memenangkan Anies Baswedan. Lewat kampanye media sosial yang sangat massif dan bersamaan dengan itu masyarakat juga mudah terpengaruh sehingga

tidak bisa lagi memverifikasi informasi secara jernih. Akhirnya, banyak berita bohong (fake news/hoax) yang disebar di media sosial.

Model kampanye seperti itu tampaknya berhasil mendefinisikan antara Muslim sejati dan Muslim yang munafik. Kaum Muslim yang memihak Basuki Tjahaja Purnama adalah kaum munafik. Di beberapa tempat bahkan terjadi insiden bahwa pengurus masjid menolak untuk menyalatkan mereka yang diidentifikasi sebagai pendukung gubernur Basuki.

Pemimpin utama dalam perkembangan populisme, dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, bukanlah pemimpin partai Islam atau pemimpin organisasi besar keagamaan besar, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, melainkan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab. Semboyan Aksi Bela Islam yang digunakan dalam demo dengan motor FPI memiliki nada yang sama dengan *make America great again, make Mexico pays, dan UK first*.

b. Ketimpangan ekonomi

Salah satu penyebab populisme adalah ketimpangan ekonomi. Pesatnya globalisasi dan ekonomi pasar menyebabkan konsentrasi kapital terakumulasi pada sektor-sektor tertentu, utamanya industri ekstraktif, properti/lahan yasan, finansial, dan teknologi tinggi sehingga mempercepat akumulasi kapital. Perkembangan tersebut menimbulkan dan mendorong pembangunan yang tidak setara.¹²

Negara Indonesia pun juga lagi rawan akan ketimpangan. Laporan OXFAM tahun 2017 menyatakan empat miliader terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih dari 100 penduduk miskin di Indonesia.¹³

Ketimpangan ekonomi di Indonesia makin meningkat dan belakangan ini mencapai rekor tertinggi 0,41 yang diukur berdasarkan Indeks Gini pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selain implikasi ekonomi, isu

¹² Zulfan Tadjoeddin, “Populism, Identity Politics, and Globalization: Does Indonesia Follow the Global Narrative?” dalam Luky Djani, *Persenyawaan Politik Identitas dan Populisme: Tawaran Kerangka Analisis*, Prisma edisi

Bangkitnya Populisme dan Krisis Demokrasi, Volume 36/2017, Nomor 3, 2017, Jakarta: LP3ES, halaman 10 – 19.

¹³ Oxfam Briefing Paper, *Menuju Indonesia Yang Lebih Setara*, Jakarta: Infid, 2017, halaman 9.

meningkatnya ketimpangan juga penting secara sosial dan politik karena bisa membahayakan stabilitas masyarakat, terutama di negara demokrasi yang besar, muda, dan beragam seperti Indonesia yang diganggu oleh merebaknya kemiskinan dan kerentanan di tengah meningkatnya harapan.

Problem ketimpangan di Indonesia sangatlah rumit. Di Filipina, masyarakat kaya dan miskin, agamanya sama. Di Thailand, masyarakat kaya dan miskin, agamanya sama. Di Indonesia, masyarakat kaya dan miskin, agamanya beda. Masyarakat kaya di Indonesia sangat diidentikkan dengan minoritas, baik agama maupun sukunya. Meskipun ada juga kaum minoritas yang juga miskin dan kaum mayoritas yang kaya raya. Situasi yang demikian mengundang masuknya populisme.

Pemimpin yang populis akan menggunakan isu ketimpangan sebagai “jualan utama” dalam kampanyenya. Kita bisa melihat pemimpin yang tadinya berbisnis dengan bebas, kemudian dengan lantang berbicara ekonomi kerakyatan, dalam hal ini, diartikan ekonomi pribumi. Para pribumi yang dimaksud mungkin pekerja rendahan, bukan kelas borjuasi. Pekerja rendahan ini pastinya posisinya sangat jauh dari kata aman. Pekerja rendahan ini akan rawan dipecah karena keterampilannya kurang memadai.

Pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan keuangan telah menyingkirkan para pekerja rendahan ini. Mereka tidak bisa turut serta dalam ekonomi sektor jasa dan keuangan. Perusahaan manufaktur yang memperkerjakan mereka juga sudah bangkrut atau memindahkan produksinya ke negara yang upah buruhnya masih murah.

Demokrasi elektoral dan pemimpin yang populis memungkinkan mereka menjadi pemenang. Para pekerja rendahan ini dibangkitkan populisme janji surga bahwa jika kamu pilih mereka, tidak ada kehidupan esok yang cerah. Namun, apakah yang demikian terjadi di Indonesia?

Jika kita mencermati demo 411 dan 212, kita tidak menemukan karakter populisme

sesungguhnya, misalnya, peserta demo tersebut adalah rakyat miskin kota versus penguasa yang korup. Peserta demo tersebut adalah lintas-batas, baik kaya maupun miskin bersatu. Kehadiran kelompok orang kaya atau kelas menengah bisa diartikan sebagai wujud kekhawatiran mereka terhadap persaingan global. Pemimpin yang populis berjanji akan melindungi mereka, misalnya, di DKI Jakarta, ada program OKE – OCE, rumah DP 0 persen, dan membatalkan reklamasi. Janji-janji tersebut sejatinya menysar kaum miskin kota, tetapi kaum menengah yang merasa takut bersaing juga akan memanfaatkannya. Di sinilah kelebihan pemimpin yang populis, mereka bisa menggerakkan rakyat secara lintas-kelas tanpa mengetahui dengan jelas latar belakang atau posisi politik mereka.

c. Menguatnya politik identitas

Indonesia adalah negara yang multikultural. Pastinya akan banyak suku bangsa di Indonesia. Kondisi ini akan dimanfaatkan oleh pemimpin populis demi kemenangan dirinya. Sebagai contoh, Anies Baswedan pernah berceramah bahwa orang Arab lebih dahulu mendeklarasikan keindonesiaannya jika dibandingkan Indonesia merdeka. Isu begitu mengena karena mengasosiasikan Arab dan umat Islam atau Arab adalah umat Islam. Faktanya, jauh sebelum orang Arab mendeklarasikan keindonesiaannya, Sumpah Pemuda sudah dilaksanakan.

Politik identitas inilah yang menjadi kebangkitan populisme kanan, jika di Indonesia, dapat disebut populisme Islam. Sebagaimana diketahui, populisme bukan sebuah ideologi. Populisme tidak menawarkan masyarakat sama rasa dan sama kaya sebagaimana ideologi Sosialisme/Komunisme. Populisme juga tidak menganjurkan masyarakat untuk hidup giat bekerja untuk memperoleh kekayaan sebagaimana ideologi Kapitalisme.

Made Supriatma menganalisis naiknya populisme karena kecerdikan politisi populis dalam mengeksploitasi kemarahan dan rasa

frustasi dalam masyarakat, tetapi tidak mampu menawarkan solusi. Mereka menyalurkan kemarahan ini menjadi kebencian kepada yang lain. Alih-alih memberikan imajinasi tentang kebahagiaan dari sebuah masyarakat ideal, para politisi populis memainkan perasaan terancam (*insecurity*) dari rakyat kebanyakan. Mereka menanamkan ketakutan, bukan harapan.¹⁴

Situasi ini terjadi jika politik identitas dibesar-besarkan, misalnya, kelompok Tionghoa yang kaya raya dibenturkan dengan kelompok pribumi yang miskin. Tugas pemimpin populisme adalah mendekati mereka, kemudian mengaku sebagai bagian dari mereka, terutama rakyat yang miskin, untuk membangkitkan rasa kemarahan mereka melawan ketidakadilan.

Politik identitas ini akan menggerus demokrasi. Mengapa? Demokrasi sendiri memiliki keterbatasan dalam keterwakilan kelompok esktrim dan meskipun sudah menganut demokrasi, tetap saja terjadi tata kelola yang buruk. Situasi seperti ini menyebabkan rakyat akan tidak merasakan pelayanan yang baik dari pemerintah dan tercukupinya jaminan sosial dasar yang menjadi kewajiban negara.

Rakyat yang merasakan ketidakadilan sosial karena ketidakamanan ekonomi akan memperkuat identitas kolektif (rakyat miskin) berdasarkan ikatan primordial (pribumi). Kelompok rakyat miskin dan pribumi yang tadi merasa dilalaikan haknya oleh pemerintah karena buruknya tata kelola akan mudah mendukung gagasan pemimpin populis.

Populisme yang berkembang di Eropa akan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan populisme di Indonesia jika kita merujuk pada kasus pilkada DKI Jakarta bukanlah hal yang menggembirakan. Perkembangan populisme di Indonesia disinyalir karena karena kebangkitan politik Islam garis keras dan penggunaan politik identitas. Populisme harus sedapat mungkin dihindari di Indonesia, meskipun tidak

sepenuhnya. Populisme yang wajib dihindari apabila menggunakan agama sebagai bahan kampanye dan memecah belah bangsa dengan memanfaatkan politik identitas. Jika populisme yang demikian tidak dihindari, akibatnya rusaknya solidaritas masyarakat multikultural di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Perkembangan demokrasi pasca-Orde Baru bersamaan dengan tumbuhnya politik identitas dalam perebutan kekuasaan bahkan lebih kelihatan daripada pertarungan program-program. Populisme yang berkaitan dengan politik identitas akan terus menjadi isu dalam pemilu karena kandidat juga mewakili identitas tertentu, seperti Jawa, Islam, luar Jawa

Populisme yang berkembang di Eropa akan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan populisme di Indonesia jika kita merujuk pada kasus pilkada DKI Jakarta bukanlah hal yang menggembirakan. Perkembangan populisme di Indonesia disinyalir karena karena kebangkitan politik Islam garis keras dan penggunaan politik identitas. Populisme harus sedapat mungkin dihindari di Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya. Populisme yang wajib dihindari apabila menggunakan agama sebagai bahan kampanye dan memecah belah bangsa dengan memanfaatkan politik identitas. Jika populisme yang demikian tidak dihindari, akibatnya rusaknya solidaritas masyarakat multikultural di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Rizky Mardatillah, 2017, *Populisme Sayap Kanan dan Transformasi Ekonomi-Politik Global: Tambahan untuk Perdebatan*, diakses dari indoprogres.com/2017/12/populisme-sayap-kanan-dan-transformasi-ekonomi-politik-global-tambahan-

¹⁴ Made Supriatma, *Pasang Naik Populisme Kanan?*, diakses dari indoprogres.com/2017/12/populisme-sayap-

indoprogres.com/2017/12/populisme-sayap-kanan-dan-transformasi-ekonomi-politik-global-tambahan-untukperdebatan/, pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 20.00 WIB.

- untuk perdebatan/, pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 20.00 WIB.
- [2] Ari Perdana, 2017, *Menguatnya Populisme: Trump, Brexit hingga FPI*, diakses dari indoprogress.com/2017/01/menguatnya-populisme-trump-brexit-hingga-fpi/, 2017, pada tanggal 2 Januari 2017, pukul 17.55 WIB.
- [3] Burhanudin Muhtadi, *Populisme: Madu atau Racun Bagi Demokrasi?* Dalam www.saifulmujani.com/blogs/populisme-madu-racun-bagi-demokrasi, diakses pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 21.19 WIB.
- [4] Cas Mudde and Cristobal Rovira Kaltwasser, 2017, *Populism: a very short introduction*, United States of America: Oxford University Press,
- [5] Edward Aspinall, 2014, *Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya, New Mandala New perspectives on Southeast Asia* <http://www.newmandala.org>, edisi bahasa Indonesia tanggal 21 Juni 2014, halaman 5 – 6, diakses 20 Januari 2018, pukul 07.32 WIB.
- [6] John B. Judis, 2016, *The Populist Explosion. How the Great Recession Transformed American and European Politics*, New York: Columbia Global Report
- [7] Luky Djani, 2017, *Persenyawaan Politik Identitas dan Populisme: Tawaran Kerangka Analisis*, Prisma edisi Bangkitnya Populisme dan Krisis Demokrasi, Volume 36/2017, Nomor 3, 2017, Jakarta: LP3ES,
- [8] Made Supriatma, 2017, *Pasang Naik Populisme Kanan?*, diakses dari indoprogress.com/2017/12/populisme-sayap-kanan-dan-transformasi-ekonomi-politik-global-tambahan-untuk-perdebatan/, pada tanggal 15 Januari 2018, pukul 20.00 WIB
- [9] Marcus Mietzner, 2017, *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*, Hawaii: East West Center, 2017,
- [10] Margaret Canovan, 2004, *Populism for political theorist?*, *Journal of Political Ideologies* (October 2004), 9(3), page 244 – 245.